

ABSTRAK

Pembangunan daerah membutuhkan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang agar tidak menimbulkan konflik sektoral maupun sosial. Dalam konteks Provinsi Jambi, permasalahan muncul akibat tumpang tindih pemanfaatan ruang, khususnya pada sektor pertambangan, yang berpotensi menghambat investasi dan merusak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tata ruang daerah pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan menitikberatkan pada upaya sinkronisasi kebijakan untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan data empiris melalui wawancara dan telaah dokumen resmi, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan tata ruang di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara regulasi daerah dengan praktik lapangan, khususnya dalam penetapan kawasan pertambangan yang belum sepenuhnya selaras dengan RTRW. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus risiko konflik ruang dengan masyarakat lokal. Kesimpulannya, harmonisasi kebijakan tata ruang perlu diperkuat melalui koordinasi antar sektor, penegakan regulasi yang konsisten, serta mekanisme pengawasan terpadu, sehingga kepastian hukum dan keberlanjutan lingkungan dapat terjamin dalam mendukung investasi di Provinsi Jambi.

Kata kunci: Kebijakan Tata Ruang, Pertambangan, Pembangunan Berkelanjutan.

SPATIAL PLANNING POLICY FOR MINING DEVELOPMENT IN JAMBI PROVINCE

ABSTRACT

Regional development requires legal certainty in spatial utilization to prevent sectoral and social conflicts. In the context of Jambi Province, problems arise due to overlapping spatial utilization, particularly in the mining sector, which potentially hinders investment and damages the environment. This study aims to analyze regional spatial planning policies following the enactment of the Omnibus Law on Job Creation, with an emphasis on policy harmonization efforts to ensure legal certainty and sustainable development. The research method employed a normative juridical approach combined with empirical data through interviews and the examination of official documents, providing a comprehensive picture of the implementation of spatial planning policies in Jambi Province. The findings reveal that there are still discrepancies between regional regulations and field practices, especially in the designation of mining areas that are not fully aligned with the Regional Spatial Plan (RTRW). This condition creates legal uncertainty for business actors and simultaneously poses risks of spatial conflicts with local communities. In conclusion, harmonization of spatial planning policies needs to be strengthened through cross-sectoral coordination, consistent enforcement of regulations, and integrated monitoring mechanisms so that legal certainty and environmental sustainability can be ensured to support investment in Jambi Province.

Keywords: *Spatial Planning Policy, Mining, Sustainable Development.*

